

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Cabor Sepak Bola

Deantama Surya Pan Asiandaru*, Said Junaidi

Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

* Correspondence: deantamasuryapanasiandaru@students.unnes.ac.id

Abstract

This study was motivated by the low performance of soccer athletes at the regional level, despite the sport having a very large fan base. The study aims to analyze the policies of the Grobogan Regency Government in its efforts to improve the performance of soccer athletes. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study show that the local government has a clear commitment and policy framework through the 2021-2026 Disporapar Strategic Plan, as well as supporting early age training through Soccer Schools (SSB) and the local Persipur club. However, the implementation of these policies still faces various obstacles, such as limited regional budgets (APBD), inadequate sports infrastructure, a lack of certified coaches, and weak coordination and synergy between relevant institutions. The conclusion of this study indicates that the policy direction is appropriate, but it is necessary to strengthen the implementation aspects in the form of more detailed technical regulations, improved quality of coaching human resources, sustainable funding, and a more integrated and collaborative long-term development strategy between the government, community, and private sector.

Keyword: Sports policy; football; athlete development; Grobogan; local government.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya prestasi atlet sepak bola di tingkat daerah, meskipun olahraga ini memiliki basis penggemar yang sangat luas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga sepak bola. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki komitmen dan kerangka kebijakan yang jelas melalui Renstra Disporapar 2021-2026, serta mendukung pembinaan usia dini melalui Sekolah Sepak Bola (SSB) dan klub lokal Persipur. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah (APBD), infrastruktur olahraga yang belum memadai, kurangnya pelatih bersertifikat, serta lemahnya koordinasi dan sinergi antarlembaga terkait. Simpulan penelitian ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan sudah tepat, namun diperlukan penguatan aspek implementasi berupa regulasi teknis yang lebih rinci, peningkatan kualitas SDM pelatih, pendanaan yang berkelanjutan, dan strategi pembinaan jangka panjang yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Kata kunci: Kebijakan olahraga; sepak bola; pembinaan atlet; Grobogan; pemerintah daerah.

Received: 24 Juli 2025 | Revised: 19 September, 31 Oktober 2025

Accepted: 12 November 2025 | Published: 3 Desember 2025



Jurnal Porkes is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi kesehatan fisik dan mental maupun dalam hal kinerja di berbagai bidang (Armaita et al., 2024). Olahraga memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di tingkat nasional karena olahraga dapat meningkatkan disiplin, kerja sama tim, dan semangat juang sejak usia dini (Ardana & Junaidi, 2025). Menurut (Yudho, 2017:72), olahraga adalah aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan gerak fundamental dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan olahraga tertentu. Olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sumber kesenangan dan rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pencapaian yang dapat meningkatkan reputasi global bangsa (Mutohir et al., 2024:103).

Bahkan, olahraga sering kali digunakan sebagai representasi kekuatan nasional yang mampu memperkuat persatuan masyarakat dan identitas kolektif (Aulia, 2024). Kemajuan di bidang olahraga sangat bergantung pada penataan yang terstruktur, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung pengembangan atlet secara terus-menerus. Salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia adalah sepak bola. Sepak bola diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan telah menjadi olahraga dengan basis penggemar terbesar di dunia. Popularitasnya menjadikan sepak bola sebagai wadah pembentukan karakter dan ajang peningkatan kualitas atlet (Hasyim, 2024:59).

Kecintaan masyarakat terhadap sepak bola tercermin dalam tingginya animo penonton terhadap kompetisi lokal maupun internasional. Demi meraih prestasi di cabang ini, para atlet dituntut memiliki stamina tinggi, teknik permainan yang baik, serta dukungan sistem pembinaan yang berkelanjutan (Rafly & Bulqini, 2025). Sehingga perhatian terhadap sepak bola tidak hanya harus datang dari komunitas atau klub, tetapi juga dari pemangku kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar pembinaan berjalan optimal. Federation Internationale de Football Association (FIFA) sebagai organisasi sepak bola dunia menjadi rujukan utama dalam pengelolaan sepak bola di berbagai negara, termasuk Indonesia (Zulhidayat, 2018).

Di tingkat nasional, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bertugas sebagai pengelola dan pembina sepak bola yang mengacu pada regulasi FIFA, PSSI sendiri lahir dari semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan, dan hingga kini menjadi alat pemersatu bangsa melalui sepak bola (Zulhidayat, 2018). Dalam konteks ini, sinergi antara aturan internasional dan kebijakan nasional menjadi kunci keberhasilan pembinaan sepak bola nasional (Nur et al., 2025; Amali, 2022). Meskipun demikian, penerapan kebijakan di tingkat nasional perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar pembinaan di daerah juga dapat berjalan efektif.

Pembangunan olahraga di Indonesia sejatinya tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan sistem pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan, yang melibatkan pelatih, fasilitas, manajemen organisasi olahraga, hingga kebijakan strategis pemerintah. (Supriadi et al., 2024) menyatakan bahwa kualitas prestasi olahraga sangat ditentukan oleh input yang berkualitas dan proses pembinaan yang ilmiah. Pembinaan yang tidak sistematis dan tanpa dasar kebijakan yang kuat akan menghasilkan prestasi yang tidak berkelanjutan (Sudarmono et al., 2018). Jika salah satu subsistem dalam pembinaan olahraga tidak berjalan optimal, maka hasil akhir juga akan sulit mencapai standar yang diharapkan.

Kebijakan olahraga nasional dirancang untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan keolahragaan di seluruh Indonesia, dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan prestasi yang membanggakan bangsa. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan, dituntut untuk mampu mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing (Jopang, 2018). Kajian terhadap kebijakan daerah dalam pengembangan olahraga menjadi penting untuk mengukur efektivitas implementasinya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan olahraga masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama di tingkat daerah. Banyak atlet sepak bola di daerah yang kesulitan mendapatkan fasilitas latihan yang layak, kekurangan pelatih profesional, serta kurangnya kejelasan sistem jenjang pembinaan yang terstruktur (Ambari & Kriswantoro, 2023). Selain itu, keterbatasan anggaran daerah untuk olahraga juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan (Sari et al., 2025). Akibatnya, gejala seperti rendahnya prestasi atlet daerah, terbatasnya regenerasi pemain muda, hingga ketertinggalan dalam kompetisi tingkat provinsi maupun nasional sering terjadi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan olahraga daerah agar pembinaan dapat berlangsung berkesinambungan. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah daerah yang seharusnya mendukung pembinaan olahraga secara menyeluruh. Banyak kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, seperti minimnya anggaran, kurangnya pelatih bersertifikat, dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pembinaan yang terintegrasi juga masih sangat rendah (Maulana & Ali, 2023).

Lemahnya koordinasi antar-stakeholder menyebabkan potensi atlet daerah tidak berkembang secara maksimal dan berpengaruh pada rendahnya daya saing dalam kompetisi tingkat regional maupun nasional. Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan komitmen dalam pengembangan olahraga, khususnya cabang sepak bola. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbupdar) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021–2026 yang berorientasi pada peningkatan prestasi pemuda dan penguatan olahraga daerah. Strategi tersebut mencakup pembinaan terpadu, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pemuda berprestasi.

Dukungan terhadap klub sepak bola lokal seperti Persipur menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membina atlet sepak bola sejak usia dini hingga tingkat kompetitif. Renstra Disbupdar Kabupaten Grobogan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program pembinaan olahraga. Dalam dokumen tersebut, terdapat strategi untuk meningkatkan fasilitasi partisipasi pemuda dalam event keolahragaan, membangun sistem pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur olahraga yang representatif. Renovasi Stadion Krida Bhakti serta partisipasi Persipur dalam Liga 3 Jateng menjadi bukti konkret implementasi kebijakan tersebut. Namun hingga kini belum terdapat kajian akademik yang secara khusus mengevaluasi

efektivitas kebijakan ini terhadap peningkatan prestasi atlet, khususnya dalam cabang sepak bola.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu ditelaah sebagai studi kasus kebijakan olahraga berbasis lokal. Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya disparitas antara pendekatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan serta pembinaan olahraga. Sehingga penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam bidang olahraga serta sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan prestasi atlet cabang olahraga sepak bola. Perlu pendekatan kualitatif dan fokus pada kebijakan publik, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan strategi pembinaan olahraga daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga sepak bola. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk memahami konteks sosial secara naturalistik, di mana fenomena diteliti sebagaimana adanya tanpa manipulasi variabel. Menurut (Sugiyono, 2019:73) pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan proses kebijakan dari perspektif para pelaku kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan subjek penelitian yang terdiri atas individu-individu yang terlibat langsung dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan olahraga daerah. Informan utama meliputi Dr. Wahono, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Grobogan; Yoyok Prihantoro, A.Md. Kom., S.M. sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Grobogan; Nur Yasin, S.STP., M.H. selaku Kepala Bidang Olahraga Disporapar; serta H. Pangkat Djoko Widodo, S.H., M.M. sebagai Ketua Askab PSSI Kabupaten Grobogan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kewenangan, pengalaman, serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan olahraga di tingkat daerah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, kemudian divalidasi secara konseptual melalui bimbingan ahli kebijakan olahraga untuk memastikan kejelasan dan relevansi pertanyaan. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sarana dan prasarana olahraga, kegiatan pembinaan atlet, serta praktik implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, data dokumentasi diperoleh dari arsip kebijakan, seperti Rencana Strategis (Renstra) Disporapar Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, laporan kegiatan KONI, dan dokumentasi foto hasil wawancara dengan para informan yang menggambarkan keterlibatan

mereka dalam kebijakan olahraga daerah. Dokumentasi visual wawancara dengan para informan seperti Kepala Disporapar, Ketua Umum KONI, Kepala Bidang Olahraga, dan Ketua Askab PSSI Grobogan dapat dilihat pada Gambar 1 hingga Gambar 4



Gambar 1. Wawancara dengan Dr. Wahono, S.Pd., M.Pd., Kepala Disporapar Grobogan



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Yoyok Prihantoro, Amd., Kom., S.M., Ketua Umum KONI Kabupaten Grobogan



Gambar 3. Wawancara Bapak Nur Yasin, S. STP., M.H, Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kabupaten Grobogan



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak H. Pangkat Djoko Widodo, .H., M.M., Ketua Umum Askab PSSI Grobogan

Proses analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola kebijakan, bentuk implementasi, serta dampaknya terhadap pembinaan dan prestasi atlet sepak bola. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten.

Selama proses ini, peneliti juga menerapkan prinsip reflektif dan fleksibel agar interpretasi data tetap terbuka terhadap makna-makna baru yang muncul dari lapangan. Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai

informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap temuan dapat diuji konsistensinya dari berbagai sudut pandang dan bukti empiris. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Seluruh informan telah memberikan persetujuan atau informed consent sebelum wawancara dilakukan, dan peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

Prinsip-prinsip etika seperti menghormati privasi, transparansi tujuan penelitian, dan tanggung jawab ilmiah diterapkan sepanjang proses penelitian. Pendekatan kualitatif ini memberikan keunggulan dalam memahami kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menangkap realitas dinamis dari implementasi kebijakan olahraga di tingkat daerah, termasuk strategi, tantangan, dan persepsi para pelaksana kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan olahraga secara tekstual, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta dirasakan secara nyata oleh para aktor olahraga di Kabupaten Grobogan.

Hasil

Penelitian ini mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga sepak bola. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI, pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB), serta melalui dokumentasi kebijakan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang cukup kuat terhadap pengembangan olahraga prestasi, yang diwujudkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disporapar Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Visi pembangunan olahraga yang tercantum, yaitu "*mewujudkan masyarakat Grobogan yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing melalui olahraga,*" menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan.

1) Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Grobogan menempatkan pembinaan olahraga sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia daerah. Renstra Disporapar Tahun 2021-2026 menjadi dasar pelaksanaan kebijakan yang mengarahkan kegiatan olahraga pada aspek pembinaan, peningkatan prestasi, dan penguatan kelembagaan olahraga. Visi pembangunan olahraga yang ditetapkan, yaitu "*mewujudkan masyarakat Grobogan yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing melalui olahraga,*" menjadi pedoman dalam setiap program pembinaan. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga keolahragaan, pelatih, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan. Penelitian menemukan bahwa pemerintah telah berupaya mengembangkan regulasi pendukung, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal di lapangan. Masih terdapat kendala pada aspek koordinasi teknis antarinstansi serta keterlambatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembinaan. Kurangnya pedoman pelaksanaan yang jelas juga menyebabkan variasi dalam penerapan kebijakan di berbagai tingkatan.

Secara umum, arah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi mekanisme pengawasan dan evaluasi belum berjalan konsisten.

2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu bentuk nyata kebijakan pemerintah daerah adalah dukungan terhadap pembinaan atlet sepak bola usia dini melalui pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB) di berbagai kecamatan. Pemerintah daerah menyediakan sarana latihan seperti bola, rompi, dan dukungan teknis melalui kerja sama dengan Askab PSSI Grobogan. Program pembinaan ini diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial yang dapat melanjutkan karier ke jenjang profesional. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelatih belum merata dan sebagian belum memiliki sertifikasi resmi. Belum adanya sistem pembinaan berjenjang juga berdampak pada terputusnya rantai regenerasi atlet daerah. Pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan melibatkan klub lokal seperti Persipur Grobogan sebagai wadah pembinaan lanjutan. Klub ini memperoleh bantuan operasional dan memanfaatkan Stadion Krida Bhakti untuk latihan serta pertandingan resmi. Walaupun demikian, keterbatasan dana, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya kompetisi rutin masih menjadi penghambat peningkatan prestasi secara signifikan.

3) Infrastruktur dan Pendanaan Olahraga

Kondisi infrastruktur olahraga di Kabupaten Grobogan masih tergolong terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Banyak lapangan sepak bola belum memenuhi standar pelatihan profesional dan tidak dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang ganti, tribun, atau penerangan malam hari. Renovasi Stadion Krida Bhakti Purwodadi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam periode Renstra 2021–2026. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, keterbatasan fiskal menyebabkan proyek perbaikan berjalan lambat dan belum menjangkau seluruh fasilitas olahraga yang ada. Pemerintah mencoba membuka peluang pendanaan alternatif melalui dana pusat serta kemitraan dengan pihak ketiga, meskipun masih dalam tahap negosiasi. Selain itu, kebijakan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi sudah berjalan dalam bentuk bonus dan piagam penghargaanInsentif tersebut masih bersifat seremonial dan belum mencakup dukungan jangka panjang seperti beasiswa atau program pascakarier bagi atlet.

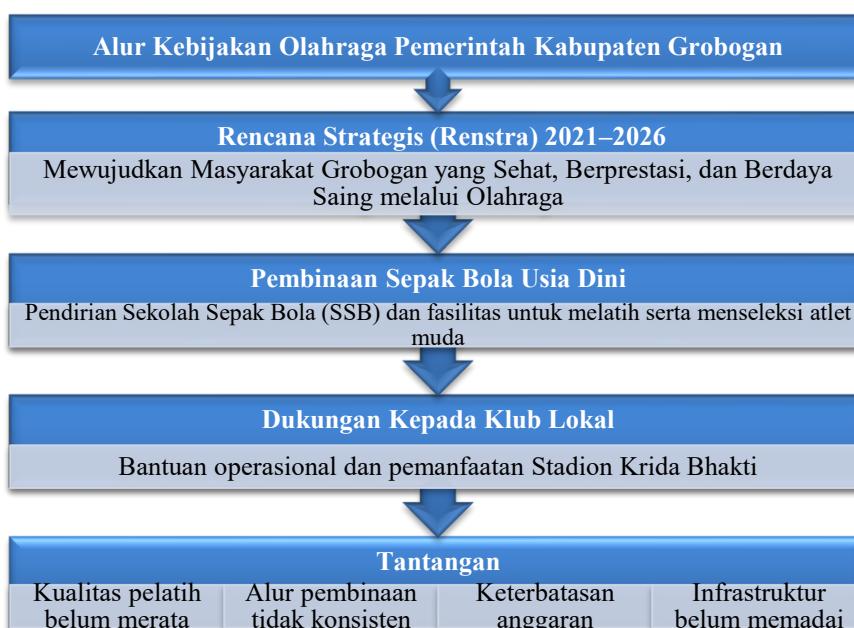
4) Koordinasi dan Sinergi Antar-Lembaga

Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Disporapar, KONI, Dinas Pendidikan, dan masyarakat olahraga di Grobogan belum berjalan optimal. Banyak potensi atlet muda belum terakomodasi secara sistematis karena tidak adanya basis data terpadu antarinstansi. Ketiadaan regulasi teknis tentang kerja sama lintas sektor membuat pengelolaan pembinaan atlet berjalan secara parsial. Beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan sekolah, klub, dan dinas belum saling terhubung dalam satu sistem manajemen terpadu. Komunikasi antarinstansi masih bersifat informal dan belum diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman jangka panjang. Lemahnya koordinasi ini mengakibatkan beberapa program pembinaan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi target dan evaluasi yang jelas. Pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan upaya ke arah perbaikan, tetapi mekanisme pengawasan belum konsisten dijalankan. Akibatnya,

kebijakan yang sudah baik di atas kertas belum mampu menghasilkan peningkatan prestasi yang signifikan di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memberikan arah yang positif terhadap pengembangan olahraga, khususnya cabang sepak bola. Upaya pemerintah dalam menyediakan kebijakan, fasilitas, dan dukungan kelembagaan menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun prestasi daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh antara pembinaan, pendanaan, serta evaluasi kebijakan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas pelatih, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama yang harus segera dibenahi.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan sektor pendidikan, klub olahraga, dan pihak swasta dalam membangun sistem pembinaan jangka panjang. Evaluasi berbasis data juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan secara berkelanjutan. Diperlukan strategi baru yang lebih kolaboratif agar pembinaan atlet tidak hanya berhenti di tingkat lokal tetapi mampu menembus kompetisi nasional. Dalam memperjelas hasil temuan, Gambar 5 disajikan guna menggambarkan alur kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembinaan prestasi sepak bola daerah.



Gambar 5. Alur kebijakan pemerintah kabupaten grobogan dalam pembinaan prestasi sepak bola

Gambar 5 alur kebijakan olahraga pemerintah kabupaten grobogan menggambarkan hubungan sistematis antara perencanaan, pelaksanaan, dan tantangan dalam pembinaan prestasi sepak bola daerah. Kebijakan ini berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Disporapar Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 dengan visi “*Mewujudkan masyarakat Grobogan yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing melalui olahraga.*” Dalam implementasinya, pemerintah menitikberatkan pada dua pilar utama, yaitu pembinaan sepak bola usia dini melalui pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB) dan penyediaan fasilitas latihan, serta dukungan

terhadap klub lokal Persipur Grobogan melalui bantuan operasional dan pemanfaatan Stadion Krida Bhakti sebagai pusat kegiatan olahraga.

Alur kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan sejak usia muda hingga tingkat kompetitif. Namun, pada tahap pelaksanaan masih terdapat berbagai tantangan, antara lain kualitas pelatih yang belum merata, alur pembinaan yang belum konsisten, keterbatasan anggaran daerah, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Maka alur kebijakan ini mencerminkan bahwa keberhasilan pembinaan prestasi sepak bola di Kabupaten Grobogan sangat bergantung pada penguatan sumber daya manusia, konsistensi program, dan dukungan sarana-prasarana yang berkesinambungan.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam bidang olahraga menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Komitmen tersebut tampak melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disporapar serta kerja sama dengan lembaga seperti KONI dan Askab PSSI Grobogan. Model tata kelola olahraga yang melibatkan banyak aktor ini sejalan dengan teori *governance network* yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam kebijakan publik (Supriadi et al., 2022). Visi pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi menjadi dasar dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan. Lemahnya koordinasi lintas lembaga menunjukkan bahwa tata kelola olahraga di Grobogan masih bersifat top down, belum sepenuhnya kolaboratif sebagaimana diamanatkan dalam konsep *multi-stakeholder governance*. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pembinaan olahraga di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Disporapar, sebagian besar anggaran infrastruktur dan pembinaan atlet masih bergantung pada APBD yang nilainya fluktuatif setiap tahun.

Kondisi ini berdampak pada lambatnya peningkatan fasilitas, termasuk Stadion Krida Bhakti yang baru direnovasi sebagian dan belum memenuhi standar pelatihan profesional. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dlis et al., 2021) bahwa kualitas infrastruktur memiliki hubungan langsung dengan performa dan keselamatan atlet. Selain itu, beberapa kebijakan strategis belum disertai regulasi teknis seperti Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pelaksanaannya secara rinci. Akibatnya, terjadi inkonsistensi antara rencana makro dalam Renstra dan praktik lapangan yang memperlemah efektivitas implementasi kebijakan olahraga daerah. Dalam aspek pembinaan dan sumber daya manusia, pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) di berbagai kecamatan merupakan langkah positif dalam mengembangkan potensi atlet muda.

Namun, hasil wawancara dengan Askab PSSI Grobogan menunjukkan bahwa sebagian besar pelatih belum memiliki lisensi resmi, sementara sistem kompetisi usia dini belum berjalan secara rutin. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *Long Term Athlete Development (LTAD)* yang menekankan pembinaan berjenjang dan sistematis sejak usia muda (Sumarno & Imawati, 2023). Kurangnya pelatihan bersertifikat dan minimnya kompetisi membuat potensi

atlet muda sulit terpantau dan berkembang optimal. Berdasarkan teori *policy execution*, hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan kebijakan yang tidak diikuti kesiapan perangkat pendukung di lapangan.

Aspek pendanaan juga masih menunjukkan pola yang belum stabil dan tidak berkelanjutan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalokasikan hibah sebesar Rp15 miliar kepada KONI dan Rp350 juta kepada klub Persipur Grobogan untuk mendukung partisipasi dalam Liga 3 Jawa Tengah. Namun, pada tahun 2024 klub tersebut tidak dapat mengikuti kompetisi karena ketidadaan dana, yang menunjukkan lemahnya sistem pendanaan jangka panjang. Ketidakstabilan alokasi dana berdampak pada penurunan motivasi atlet serta keterhentian program pembinaan. Menurut (Asmawi et al., 2022), pendanaan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam sistem pembinaan olahraga modern yang menyeluruh.

Maka mekanisme *performance-based budgeting* perlu diterapkan agar alokasi dana pembinaan lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi dengan sektor swasta semestinya menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem pembinaan olahraga daerah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pola *public-private partnership* di Kabupaten Grobogan masih lemah dan bersifat insidental. Minimnya dukungan sponsor serta keterlibatan dunia usaha menyebabkan banyak program pembinaan tidak berkelanjutan. Padahal, (Mutohir et al., 2024) menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani interaksi antara sektor bisnis dan komunitas olahraga.

Pemerintah daerah dapat menarik minat sektor swasta melalui insentif pajak, branding bersama, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis pendanaan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan olahraga daerah. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembinaan sepak bola di Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelatih SSB, sebagian besar orang tua masih menganggap olahraga sebagai kegiatan rekreasi, bukan potensi karier profesional. Padahal, olahraga memiliki nilai strategis dalam membentuk disiplin, kerja sama, dan semangat berkompetisi sejak dulu.

Rendahnya kesadaran publik ini menunjukkan bahwa kebijakan olahraga perlu menyentuh dimensi sosialisasi dan pendidikan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menggandeng sekolah dan media lokal untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang manfaat olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia. Melalui dukungan publik yang kuat, pembinaan sepak bola daerah akan memiliki fondasi sosial yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan olahraga daerah bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu tata kelola yang kolaboratif, pendanaan yang berkelanjutan, dan pembinaan SDM yang terstruktur.

Ketiga pilar tersebut membentuk model *adaptive local sports policy framework* yang disesuaikan dengan potensi dan kapasitas daerah. Implikasi praktis dari model ini adalah perlunya integrasi antara perencanaan strategis, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergi yang kuat antar unsur tersebut, kebijakan olahraga daerah dapat berkembang dari sekadar program berbasis event menjadi sistem pembinaan jangka panjang. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan

atlet dan daya saing daerah. Sehingga kebijakan olahraga di Kabupaten Grobogan memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan olahraga daerah yang berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam pengembangan sektor olahraga melalui kebijakan-kebijakan yang disusun secara struktural. Kehadiran Disporapar sebagai institusi teknis serta kerja sama dengan KONI Kabupaten Grobogan merupakan langkah strategis dalam tata kelola olahraga. Selain itu, eksistensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi payung hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada ketercapaian target program, serta absennya regulasi teknis yang lebih rinci dan responsif terhadap dinamika tiap cabang olahraga, termasuk sepak bola.

Dalam konteks cabang olahraga sepak bola, kebijakan pemerintah diarahkan pada tiga aspek utama: pembinaan usia dini, fasilitasi partisipasi dalam kompetisi, dan pemberian insentif prestasi. Upaya ini tercermin dari dukungan terhadap keberadaan Sekolah Sepak Bola (SSB), pengiriman atlet ke ajang kompetisi seperti Porprov, serta pemberian bonus kepada atlet dan tim yang berprestasi. Meski demikian, efektivitas dari kebijakan tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti belum memadainya infrastruktur khususnya kondisi Stadion Krida Bhakti dan lapangan latihan desa, kualitas pelatih yang belum optimal, serta sistem kompetisi berjenjang yang belum berjalan secara sistematis. Ketergantungan terhadap dana APBD juga menunjukkan belum optimalnya peran pihak swasta dalam mendukung pembinaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan prestasi atlet sepak bola sudah berada pada jalur yang benar, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek implementatif. Reformasi kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang sangat diperlukan, termasuk pengembangan SDM pelatih, investasi infrastruktur yang merata, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya model pembinaan holistik yang tidak hanya berfokus pada capaian prestasi sesaat, tetapi juga memberikan jaminan pendidikan dan masa depan karier bagi para atlet. Pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pembinaan sepak bola yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian orisinal yang dilakukan tanpa unsur plagiarisme, serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya dalam jurnal atau media ilmiah mana pun, baik cetak maupun elektronik. Seluruh data, pendapat, dan hasil analisis yang disajikan dalam tulisan ini telah disusun berdasarkan proses penelitian kualitatif yang sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Daftar Pustaka

- Armaita, A., Marni, L., Yoselina, P., & Anggita, K. D. (2024). Pelaksanaan Senam Sehat Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Fisik dan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Ampalu Kota Pariaman. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 7(4), 548-556. <https://bulletinnagari.lppm.unand.ac.id/index.php/bln/article/view/722>
- Ardana, A. W., & Junaidi, S. (2025). Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Olahraga Sepakbola di Akademi Terang Bangsa. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 11(1), 2775–7609 <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/4074>
- Aulia, D. (2025). Semangat Suporter Timnas Indonesia: Wujud Nasionalisme di Arena Sepak Bola dan Pengaruh di Kancah Internasional. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 157-169. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.504>
- Amali, Z. (2022). Kebijakan Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(1), 63-83. <https://jopi.kemenpora.go.id/index.php/jopi/article/view/197>
- Ambari, M. Z., & Kriswantoro, K. (2023). Analisis Swot Program Pembinaan Prestasi Sekolah Sepakbola Djarum Kudus Tahun 2021. *Unnes Journal of Sport Sciences*, 7(1), 1–7.
- Asmawi, M., Yudho, F. H. P., Sina, I., Gumantan, A., Kemala, A., Iqbal, R., & Resita, C. (2022). Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas. In Jejak Pustaka: Yogyakarta. Jejak Pustaka.
- Dlis, F., Kuswahyudi, K., Bisa, M., Bachtiar, B., Lestari, A. T., Acha, B., Motto, C. A., Novetra, J., Selian, S., & Nurulfa, R. (2021). Perspektif Olahraga Indonesia Menuju Olimpiade 2032. Cv. Nakomu.
- Hasyim, H. (2024). Strategi Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Rajawali Pers.
- Jopang, J. (2018). Kebijakan pelatihan atlet pusat pendidikan dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Publicuho*. 1(1), 1-15. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/5846>
- Mutohir, C. T., Maksum, A., Kristiyanto, A., & Akbar, R. (2024). Industri Olahraga: Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru.
- Maulana, S. H., & Ali, M. A. (2023). Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga di Kota Salatiga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Tengah. *Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training)*, 7(3), 576-592. <https://doi.org/10.37058/sport.v7i3.8409>
- Nur, I. M. M. A., Nurmiyati, N., Taufik, M., Pratama, M. A. A. P., & Fahlevy, M. R. (2025). Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepak Bola di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 25-39. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.550>
- Rafly, M., & Bulqini, A. (2025). Profil Atlet Sepak Takraw Mochammad Rafly Ferdiansyah dalam Proses Pencapaian Prestasi. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 8(5), 1314-1318. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/71495>
- Supriadi, S., Solihin, A. O., & Syamsudar, B. (2024). Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga Futsal di Kabupaten Tangerang. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6589-6598. <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5233>

- Sudarmono, M. (2018). Sistem Pembinaan Ekstrakurikuler Sepakbola di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penjakora*, 5(1), 64-75.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/PENJAKORA/article/view/14478>
- Sari, N., Handayani, S. W., & Sitompul, S. J. (2025). Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Olahraga Nasional. *Jurnal Ilmiah Spirit*, 25(2), 146-149.
<https://doi.org/10.36728/jis.v25i2.4984>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarno, S., & Imawati, V. (2023). Pengembangan Bakat Untuk Atlet di Usia Muda: Pembahasan dalam Pendekatan Spesialisasi Awal Versus Multilateral. *Patria Educational Journal (PEJ)*, 3(2), 99-108.
<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/pej/article/view/1014>
- Supriadi, D., Asmara, H., Juddyta, S., Rizal, Y. M., & Mubarok, I. (2022). FGD Peningkatan Management Organisasi Pada Cabang Olahraga di Koni Kota Cimahi dan Koni Surakarta. *Jurnal Aksararaga*, 4(2), 76-81.
<https://aksaraga.stkippasundan.ac.id/index.php/aksaraga/article/view/58>
- Yudho, F. H. P. (2017). Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Jejak Pustaka.
- Zulhidayat, M. (2018). Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 222-240. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1446>